

Intoleransi Masyarakat Mayoritas Terhadap Minoritas Di Kota Cilegon

Afreiza Octaguna A; Ayesha Inaya Putri; Kent Matthew Herrenaw. Universitas Pembangunan Jaya, kentmatthew1806@gmail.com

ABSTRACT: This scientific work aims to make readers aware of the lack of tolerance in some regions in Indonesia. With this journal, we hope that people can have broad insight and instill an attitude of religious tolerance. Religious intolerance is an attitude of behavior that discriminates against certain religious groups in the form of exclusion, expulsion, physical violence in accessing public services. Someone who has an intolerant attitude tends to like to put other people down. This is the cause of intolerance in Indonesia becoming more widespread in various regions and difficult for us to control. As happened in Cilegon City, there was a rejection of the construction of places of worship in the local area and the Mayor signed the rejection of the construction. The Cilegon commotion incident was the main trigger for the intolerant attitude of the people in Cilegon City. In the case of the conflict regarding the rejection of the construction of a church in Cilegon City, it is true, this was motivated by an attitude of dislike between the majority group, namely the Islamic religion, and the minority group, namely the Christian religion, so that when they wanted to build a place of worship for the Christian religion, the majority group strongly refused. This action makes the image of the Cilegon City government untrustworthy by the public and the rights to worship of minority groups are hindered. Therefore, to achieve peace in religion, we must have a tolerant attitude towards other religious communities by respecting and respecting each other.

KEYWORDS: Intolerance, Minority, Religion, Cilegon City

ABSTRAK: Karya Ilmiah ini bertujuan untuk menyadarkan pembaca atas kurangnya toleransi pada sebagian wilayah di Indonesia. Dengan adanya jurnal ini, mengharapkan masyarakat bisa memiliki wawasan yang luas dan menanamkan sikap toleransi keberagamaan. Intoleransi agama merupakan sikap suatu perilaku yang mendiskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dalam bentuk perlakuan pengucilan, pengusiran, kekerasan fisik dalam akses layanan publik. Seseorang yang memiliki sikap intoleransi cenderung suka merendahkan orang lain, Hal tersebut menjadi penyebab intoleransi di Indonesia semakin luas di berbagai daerah dan sulit kita kendalikan. Seperti yang terjadi di Kota Cilegon, terdapat penolakan pembangunan rumah ibadah di kawasan setempat dan Wali Kota menandatangani atas penolakan pembangunan tersebut. Peristiwa Geger Cilegon ini yang menjadi pemicu utama sikap intoleran masyarakat di Kota Cilegon. Pada kasus konflik penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon ini memang benar adanya, hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sikap tidak suka antara kelompok mayoritas yaitu agama Islam dengan kaum minoritas yaitu agama Kristen, sehingga ketika ingin dibangun tempat ibadah agama Kristen ini kelompok mayoritas menolak keras.

Dengan adanya tindakan ini membuat citra Pemkot Kota Cilegon tidak dapat dipercaya masyarakat dan hak beribadah kelompok minoritas terhalangi. Maka dari itu, untuk mencapai perdamaian dalam keberagaman, kita harus mempunyai sikap toleran kepada umat beragama lainnya dengan cara menghargai dan saling menghormati.

KATA KUNCI: Intoleransi, Minoritas, Agama, Kota Cilegon

I. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Online Bahasa Indonesia, Intoleransi adalah kurangnya toleransi. Jennifer Rubin dan rekannya mendefinisikan intoleransi sebagai kurangnya penerimaan terhadap status minoritas orang lain. Sedangkan Toleransi merupakan sikap manusia yang menghargai dan menghargai perbedaan antar individu maupun antar kelompok. Untuk mencapai perdamaian dalam keberagaman, kita harus mempunyai sikap toleran. Secara etimologis toleransi berasal dari kata latin *tolerare* yang berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan dari segi terminologi, toleransi adalah suatu sikap menghargai dan saling menghormati, menyampaikan pandangan, pendapat, dan keyakinan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Ada banyak agama di negara Indonesia dengan berbagai suku, budaya, dan agama (Databoks, 2022). Agama mereka kebanyakan umat Islam tidak ingin membangun tempat ibadah atau berbenturan dengan agama lain, salah satunya adalah tumbuhnya ibadah Kristen, sehingga ada minoritas dalam pertarungan ini (Fahmi, 2017).

Tercatat HKBP Maranatha Cilegon telah mendapatkan 4 kali penolakan izin bangun gereja sejak 2006 sementara Gereja Baptis Indonesia Cilegon sudah 5 kali ditolak izin bangunya sejak 1995 dan mengalami 10 kali upaya penutupan paksa dan penyegelan, bahkan ada upaya pembongkaran paksa yang menutupi lokasi HKBP Maranatha Cilegon. Karena mayoritas orang Indonesia memiliki keyakinan agama yang berbeda, mereka didorong untuk menunaikan kewajiban agamanya itu beribadah (Mubarrak dan Kumala, 2020). Dalam melaksanakan peraturan bersama menteri agama No. 9 dan menteri dalam negeri No. 8 tahun 2006, peran FKUB ini sangat penting dalam menjaga kerukunan serta selalu berusaha melaksanakan apa yang tertua dalam peraturan tersebut.

Dalam hal pembangunan gereja di Kota Cilegon ini, banyak masyarakat-masyarakat yang terganggu serta merasa resah dengan adanya tempat ibadah Kristen di Kota Cilegon. Kontroversi atas layanan keagamaan yang belum terselesaikan atau masalah hak. Salah satu contoh kasus terjadi pada Kota Cilegon, oleh karena itu kita mengambil

judul jurnal “Intoleransi Masyarakat Mayoritas Terhadap Minoritas di Kota Cilegon”.

II. METODE

Dalam metode penelitian yang kita buat ini kita menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mengobservasi, analisis visual dan studi pustaka, sehingga metode penelitian kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah kemudian dari masalah yang ada tersebut akan menjadi dasar yang digunakan oleh para peneliti dalam mengambil data kemudian peneliti menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa yang sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.

III. HASIL

Penelitian mengidentifikasi adanya kelompok mayoritas yang mendominasi dan kelompok minoritas yang menjadi objek diskriminasi, menciptakan ketidaksetaraan dalam hak-hak masyarakat. Terdapat kecenderungan sikap intoleransi yang muncul dari ketidakmenerimaan perbedaan agama, menciptakan ketegangan antarkelompok. Penelitian mengungkap bahwa intoleransi dapat bersumber dari sikap egois, ketidakmampuan mendengarkan pandangan berbeda, dan ketidaksepakatan terhadap keberagaman. Sikap intoleransi berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan dan dapat menimbulkan konflik di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun Indonesia mengadvokasi nilai toleransi, masih ada pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti terjadi di Cilegon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia, khususnya di Cilegon, merupakan tantangan serius terhadap keberagaman masyarakat. Diperlukan upaya bersama

dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mendorong toleransi, mengatasi akar masalah, dan mencegah potensi konflik yang dapat merugikan perkembangan bangsa.

IV. PEMBAHASAN

Tiap negara pasti memiliki kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Mayoritas adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang memerintah suatu negara atau wilayah dan berbagi identitas agama, etnis, sosial dan budaya. Sedangkan minoritas adalah individu atau kelompok yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok mayoritas. Tetapi karena beberapa faktor, mayoritas selalu berani mendiskriminasi minoritas walaupun hak mereka semua sama.

Sikap Intoleransi adalah kecenderungan untuk tidak menerima atau menghormati perbedaan atau pandangan yang berbeda. Intoleransi dapat berupa kebencian kepada ras, etnis atau bahkan agama tertentu. Seseorang yang memiliki sikap intoleransi cenderung suka merendahkan orang lain. Alasannya karena memiliki sikap egois yang membuatnya tak bersedia mendengarkan orang lain dan merasa dirinya yang paling benar. Hal tersebut menjadi penyebab intoleransi di Indonesia semakin luas di berbagai daerah dan sulit kita kendalikan.

Dari sudut pandang umum maupun agama, Sikap Intoleransi sudah jelas akan merugikan siapapun dan berpotensi menimbulkan permusuhan. Toleransi merupakan satu kata yang sering diucapkan di negara Indonesia ini. Mengingat Indonesia yang kaya akan keberagaman ras, agama, suku, dan bahasa. Namun pada kenyataannya masih ada saja oknum yang melanggarnya dengan berbagai alasan. Seperti pada kasus yang terjadi di Cilegon, Banten yang sempat viral dan ramai menjadi perbincangan publik.

Berita yang dilansir dari artikel BBC News Indonesia menjelaskan adanya kasus intoleransi yang terjadi di Cilegon. Wali kota dan wakilnya yang memberikan tanda tangan pada kain yang digunakan sebagai bukti dukungan terhadap penolakan pembangunan rumah ibadah gereja di kawasan setempat. Tindakan Intoleran tersebut tertangkap oleh kamera

dan tersebar di Twitter pada Rabu (07/09) sehingga menuai banyak kontra dari warganet.

Rumah ibadah adalah tempat atau sarana umat beragama untuk melakukan ritual ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Rumah Ibadah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai tempat untuk beribadah dan berinteraksi sosial, rumah ibadah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Cilegon adalah salah satu kota di Banten yang memiliki keragaman agama. Mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terdapat pula keberagaman warga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai salah satu warga yang beragama, keberadaan rumah ibadah menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.

Adapun data yang di tulis oleh Kusnandar pada tahun 2022 di laman databoks yang membuktikan bahwa tidak ada bangunan rumah ibadah umat beragama lainnya seperti gereja protestan, katolik, pura dan vihara yang berdiri di Kota Cilegon, padahal di data tersebut juga di tuliskan mengenai jumlah warga berdasarkan agama di Kota Cilegon ada 7.003 umat beragama Kristen dan 1.823 umat beragama Katolik. Sedangkan umat beragama islam yang merupakan kelompok mayoritas ada 455,72 ribu jiwa yang setara 97,64%. Dengan data ini tidak heran bila ada artikel berita yang melabeli Kota Cilegon adalah Kota tanpa gereja seperti yang di lansir pada artikel berita CNN Indonesia.

"Pada hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, panitia hanya menyampaikan informasi proses persyaratan pembangunan rumah ibadah yang belum terpenuhi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (No 8 dan 9 Tahun 2006)," ujar Helldy sebagai alasan penolakan pembangunan gereja tersebut. Namun ternyata ada pernyataan yang berbeda disampaikan dari Yaqut Cholil Qoumas selaku menteri agama yang menyampaikan seluruh persyaratan yang telah terpenuhi namun masih tertahan dalam proses di atas. Helldy juga menyampaikan alasan lain tentang penolakannya tersebut yaitu demi memenuhi keinginan masyarakat yang ada di Cilegon dan beberapa ulama juga tokoh lainnya.

Menolak pembangunan tempat ibadah di sebuah wilayah dengan alasan minimnya jumlah kelompok/minoritas tersebut atau alasan apapun tentu tidak dapat dibenarkan karena sama saja membatasi hak dan akses seseorang untuk beribadah dengan nyaman dan mudah.

Faktanya, latar belakang dari masalah ini yaitu turunan saat masa penjajahan Belanda dimana terdapat penindasan oleh kaum kolonial belanda terhadap para ulama dan kiayi di Kota Cilegon, yang mengakibatkan keluarnya wasiat ulama Banten terkait larangan pendirian rumah ibadah untuk umat Kristen di Kota Cilegon. Untuk menanggapi hal itu keluarlah surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat dikarenakan kala itu Banten masih menjadi satu rumpun dengan Jawa Barat. Namun saat ini Cilegon bukan lagi bagian dari Jawa Barat, sehingga SK tersebut tidak lagi berlaku. Tetapi mirisnya masih ada beberapa kelompok masyarakat yang menjadikan SK tersebut acuan untuk menolak pembangunan gereja tersebut.

Peristiwa Geger Cilegon ini yang menjadi pemicu utama sikap intoleran masyarakat di Kota Cilegon yang ternyata merupakan salah satu pemberontakan besar oleh tani terbesar yang terjadi pada tanggal 09 Juli 1888 setelah pembubaran Kesultanan Banten 1813 oleh organisasi VOC. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh musibah kekeringan yang berlangsung lama mengakibatkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan terjadi wabah penyakit pes. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah kolonial memerintahkan pengambilan tindakan ekstrim dengan memberlakukan pemusnahan seluruh ternak, termasuk binatang yang tidak terinfeksi penyakit. Hal ini merupakan salah satu penyebab kemarahan awal masyarakat Cilegon, karena kolonial Belanda dianggap telah melakukan perbuatan yang keji dan seenaknya.

Di tambah, kesengsaraan rakyat semakin berat dikarenakan terjadinya musibah yang datang terus menerus, musibah tersebut juga meliputi meletusnya gunung Krakatau yang banyak memakan korban jiwa hingga kerusakan alam. Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh kolonial Belanda. Bukan hanya itu, kolonial Belanda juga sempat melarang mengumandangkan Adzan karena dianggap berisik dan mengganggu, kemudian pengambilan paksa

atau upeti terhadap masyarakat kemudian terjadinya penggusuran terhadap masyarakat atau pribumi yang notabene hampir 100 persen adalah muslim. Oleh sebab itulah kemarahan para masyarakat tidak dapat dibendung lagi dan memicu terjadinya pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh para ulama dan masyarakat setempat. Pasca pemberontakan ini banyak para ulama dan tokoh agama yang diasingkan hingga dieksekusi mati dengan cara dihukum gantung.

Alasan lain terjadinya sikap intoleransi ini adalah pernah adanya perjanjian antara Perusahaan Krakatau Steel dengan para ulama yang ada di Kota Cilegon. yang mana pada perjanjian tersebut melarang Krakatau Steel untuk mendirikan rumah ibadah lain selain rumah ibadah umat muslim di Kota Cilegon. FKUB Cilegon juga mengatakan bahwa “kurang lebih tahun 1974-1978 ada yang namanya proyek Trikora, proyek pembangunan baja Krakatau Steel pada saat itu di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Ada kesepakatan antara para ulama khususnya pesantren Al-Khairiyah waktu itu dan juga tokoh-tokoh masyarakat bersedia untuk direnovasi atau sekarang lebih tepatnya bedol desa dengan catatan tidak ada tempat ibadah umat agama lain” (Kompas.com, 2021).

Peristiwa-peristiwa serupa seperti kasus ini sudah berlawanan dari Pancasila. Sebab itu, masih banyak orang-orang yang belum bisa memahami Nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikannya. Selain itu konflik dari peristiwa ini sudah melanggar UUD 1945 yang membebaskan setiap warga negaranya untuk beragama.

Bahkan berdasarkan beberapa artikel di website berita seperti CNN Indonesia atau Detiknews mengungkapkan bahwa Kota Cilegon merupakan kota paling Intoleran alias memiliki rasa toleransi paling rendah di Indonesia. Kota Cilegon menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 hasil riset dari SETARA Institute, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani menjelaskan temuan mereka mengenai Cilegon.

Kesulitan dalam pembangunan rumah ibadah di Cilegon diakibatkan masih banyak masyarakat Kota Cilegon yang sulit menerima kehadiran kaum kristiani dan minoritas. Mendirikan rumah

Ibadah di kota ini seperti mengharuskan kita mendapat ijin dari suatu kelompok mayoritas yang sama sekali bukan wewenangnya. Peran pemerintah perlu lebih tegas lagi mengenai kasus ini dan tidak menerima langkah yang salah meskipun itu permintaan dari kelompok mayoritas, Menurut Komnas HAM, aksi penolakan terhadap pembangunan gereja merupakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Sudah seharusnya pemerintah berlaku adil dan memfasilitasi semua umat beragama di Indonesia. Hal ini membuat citra Kota Cilegon menjadi buruk dan minoritas merasa hak mereka semakin di singkirkan oleh kelompok mayoritas.

Penyebab dan faktor-faktornya pun banyak mengenai mengapa kasus Intoleransi di Indonesia semakin meningkat. Menurut para psikolog sosial dan ilmuwan sosial sekurang-kurangnya disebabkan karena empat hal utama; yakni pertama, soal kesiapan mental yang belum matang, sehingga anak-anak muda atau remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal yang disampaikan dari orang-orang yang dianggap lebih tua, lebih pintar, serta lebih “di hormati” dalam hal keagamaan. Mental kaum muda cenderung masih pendeknya dalam mencari figur siapa yang akan dijadikan “pedoman” dalam kata-kata dan hidupnya. Mereka juga cenderung menganggap bahwa orang yang lebih tua itu sudah pasti memiliki pedoman yang benar selama masa hidupnya, sehingga mereka yang lebih muda akan menelan mentah-mentah semua hal yang di ajarkan tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya.

Tumbuh besar dengan mental yang belum matang dan pengetahuan yang masih sedikit cenderung akan lebih mempercayai orang-orang yang lebih tua dan dianggap lebih pintar, khususnya dari lingkungan keluarga. Informasi dan didikan keagamaan yang keliru memengaruhi terjadinya sikap Intoleran. Umumnya dilakukan oleh oknum tertentu memakai nama agama dalam menyebarkan kebencian kepada pengikutnya dari pola pikir dan tafsir agama yang salah, akibatnya hal ini membuat suatu kelompok menjadi fanatik dan tidak menerima adanya golongan agama atau etnis yang berbeda. Dari lingkungan sekolah, di sebutkan juga oleh peneliti senior pusat

pengkajian dan masyarakat Islam (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Didin Syafruddin mengungkapkan bahwa tingginya sikap intoleran akibat dari kurangnya interaksi dan dialog antarsiswa dari berbagai latar belakang perbedaan. Menurut beliau harusnya pendidikan budi pekerti metode pelaksanaannya tidak hanya dalam ceramah atau pengajaran tapi melalui diskusi dan dialog terbuka serta pembiasaan.

Kedua, Kuatnya fanatisme dan aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada minoritas. Contohnya seperti pemakaian atribut keagamaan secara berlebihan dan menyombongkan diri dengan segala atribut yang dipakainya sehingga memaksa kelompok minoritas memakai atribut yang sama. Tidak hanya di tempat ibadah, fanatisme bisa terjadi di mana saja. Fanatisme agama semakin menyebarkan perpecahan, kekerasan dan konflik. Tidak hanya menyangkut soal perselisihan atau konflik antar agama, perselisihan, dan konflik tersebut juga bisa terjadi di internal umat beragama. Berbagai contoh bukti kekerasan antar agama atau etnis sudah menggambarkan bahwa fanatisme keagamaan bisa terjadi pada siapa pun dan melibatkan siapa saja.

Fanatisme agama sebenarnya menjadi salah satu tantangan bagi Islam dan agama-agama lain saat ini di Indonesia. Bambang Sugiharto mencatat, minimal ada 3 tantangan dihadapi agama saat ini, yaitu:

Pertama, agama ditantang tampil sebagai suara moral-otentik di tengah terjadinya disorientasi nilai dan degradasi moral. Pada sisi ini, agama seringkali disibukkan dengan krisis identitas dalam dirinya sendiri, yang berakhir pada pertengkar internal dan pada saat yang sama agama kehilangan kepekaan pada hal-hal yang bersifat substansial.

Kedua, agama ditantang untuk mampu mendobrak sikap-sikap yang mengarah pada eksklusivisme pemahaman keagamaan di tengah merebaknya krisis identitas dan pementingan kelompoknya sendiri. Agama harus menghadapi kenyataan berupa kecenderungan pluralisme, mengolahnya dalam bentuk teologi baru dan mewujudkannya dalam aksi-aksi kerjasama plural.

Ketiga, agama ditantang untuk melawan segala bentuk penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi, termasuk ketidakadilan kognitif, yang biasanya diciptakan oleh agama sendiri. Karena pemahaman keagamaan yang salah telaah oleh umatnya bisa menyebabkan suatu nama agama memiliki citra yang kurang baik.

Kasus seperti ini sudah sering terjadi terutama sering ditemukan di lingkungan sekolah, cenderung pelaku yang melakukan aksi pemaksaan hak asasi adalah guru atau kepala sekolah yang menetapkan peraturan di sekolah tersebut berlaku.

Ada seorang siswi dari kelompok minoritas yang bersekolah di SD Negeri Karawang di paksa untuk memakai jilbab, Mirisnya bahkan mendapat bullying dari kepala sekolah dan para guru. Sikap Intoleransi karena berbeda agama ini diungkap akademisi Ade Armando lewat akun Twitter @adearmando61. Korban adalah siswi kelas 2 berinisial B dan di paksa memakai jilbab oleh pihak sekolah, padahal keyakinan yang di anut oleh keluarga siswi tersebut tidak diwajibkan memakai jilbab. Setelah mengenakan pakaian seperti mayoritas siswi lainnya di sekolah, B tetap di bully bahkan di pukul oleh teman-temannya hingga saat pulang kerumah dalam keadaan hidungnya berdarah. Akhirnya orang tua B tidak terima dan melaporkan ke dinas pendidikan setempat. Tetapi setelah sekolah itu di datangi oleh anggota dinas pendidikan tidak menghasilkan perubahan sama sekali, anak itu tetap mendapat perlakuan yang sama dan orang tuanya terpaksa memindahkan B ke sekolah lain. Menurut roger, SD Negeri Karawang ini di pimpin oleh kepala sekolah dan guru-guru yang radikal dan sudah sepantasnya hak mereka terlibat sebagai ASN di cabut.

Dari kasus Intoleran di atas, bisa kita saksikan bahwa sikap fanatisme dan aksi pemaksaan hak asasi bisa terjadi dengan siapa saja bahkan anak SD yang masih di kategorikan anak kecil. Penyebab aksi pemaksaan ini karena fanatisme agama dan sifat-sifat radikal orang yang menganggap bahwa ajaran agamanya paling benar di antara agama-agama lain sehingga tidak menerima adanya kehadiran agama atau etnis lain. Pendidikan yang terjadi saat ini disusul dengan sifat mendoktrin dari seorang guru kepada siswa siswinya sehingga menjadi tidak

terkontrol dan lalu terjadilah cara berpikir siswa menjadi satu arah dan akibatnya tidak mau menerima masukan bahkan perbedaan, kemungkinan besar yang akan mereka dapat yaitu mereka akan menyetujui/ membenarkan aksi kekerasan untuk membela kelompok atau agamanya seperti kejadian kasus ini.

Keempat, persoalan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi sering diungkapkan oleh para ahli ekonomi politik dan sosiolog menjadi bibit paling subur munculnya intoleransi dan kekerasan. Karena hidup susah yang di derita, sulit mendapat pekerjaan, dan harga-harga barang sembako yang semakin naik kian hari. Kesenjangan ekonomi cenderung membuat Kesehatan mental orang memburuk. Di tambah lingkungan yang menunjukkan kesenjangan dengan kelemahan hukum terhadap rakyat jelata dan pembagian sumber daya alam yang tidak merata memicu munculnya suasana ketidakadilan yang dirasakan oleh warga masyarakat. Ketika ada sekelompok atau seseorang menyiramkan bibit kebencian dan iming-iming masuk surga segera tanpa ragu mereka akan mengikutinya.

Pengamat Gerakan-Gerakan Keagamaan dari UNSOED Purwokerto, Hariyadi berpendapat bahwa sikap Intoleran bisa saja muncul akibat hilangnya kuasa ekonomi. Dalam penelitiannya, daerah yang mengalami banyak sikap Intoleran ternyata ada indeks kesenjangan ekonomi yang tinggi. Untuk mewujudkan kehidupan yang toleran dan rukun harus dibarengi dengan upaya untuk mewujudkan kesetaraan akses pada ekonomi, sosial, dan politik sehingga masyarakat lebih sejahtera.

Peneliti SETARA Institute, yakni Ismail Hasani saat memaparkan hasil riset SETARA Institute bertajuk "Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat dan Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan" di Jakarta mengatakan sebagian besar masyarakat menolak keberadaan organisasi radikal. Menurut beliau, rasa frustrasi sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemerataan pembangunan dan ekonomi menjadi sebab utama terjadinya sikap intoleransi. Bahkan masyarakat Jabodetabek

lebih merasa risih ketika tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah ibadah yang memiliki latar agama berbeda.

Dan kelima, rendahnya keadilan dan penegakan hukum dari pemerintah atau aparaturnya negara dalam menangani kasus-kasus Intoleran seperti yang terjadi di Kota Cilegon ini. Mereka cenderung memihak kepentingan salah satu kubu alias kelompok mayoritas dengan berbagai alasan seperti uang, agama, golongan, bahkan kasta. Oknum-oknum yang seperti itu menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin menurun pada mereka dan ketidakadilan ini bisa memicu konflik bahkan berujung permusuhan. Radikalisme juga disebabkan buruknya dalam hal penegakan hukum sehingga menimbulkan apa yang sering disebut sebagai ketidakadilan hukum.

Kembali lagi pada kasus sikap intoleran di Kota Cilegon, Ada beberapa solusi permasalahan tersebut yang sudah dilakukan baik dari pemerintah maupun warga. Pihak pemerintah sudah ikut turun tangan untuk menegur walikota dari Kota Cilegon hingga Ormas yang membuat dialog antar umat beragama agar dapat saling memahami.

Dengan perkembangan teknologi yang jaman sekarang makin canggih dan modern. Peran yang bisa dilakukan masyarakat yaitu bisa membangun toleransi melalui media sosial. Media sosial mampu menggiring opini masyarakat. Dari peran media sosial sendiri banyak seperti diskusi, komunikasi, sarana hiburan, edukasi, promosi, dan lain-lain. Dampak media sosial sangat luas dan cepat bahkan mencakup 1 dunia, dengan kemudahan akses teknologi pesan dan informasi menjadi cepat tersampaikan.

Peran media sosial sebagai sarana untuk diskusi dan komunikasi bisa dimulai dari topik ringan hingga topik berat seperti masalah ekonomi, agama, dan politik. Berbagai kalangan dan generasi orang hampir memakai semua media sosial karena harus mengikuti perkembangan jaman untuk beradaptasi. Masyarakat bisa membangun toleransi dengan memberikan edukasi-edukasi tentang budi pekerti atau keberagaman latar belakang di Indonesia, menjalin hubungan dengan teman yang berbeda agama atau etnis, serta menambah wawasan mengenai pentingnya toleransi dan keberagaman untuk pemersatu

bangsa. Komunitas atau organisasi yang di dirikan oleh masyarakat juga bisa mendirikan kampanye melalui media sosial untuk menggerakkan sikap toleransi terhadap masyarakat Indonesia sebagai perwujudan betapa indahnya keberagaman dalam kerukunan.

Meski begitu, tidak sedikit yang menyalahgunakan pemakaian teknologi modern ini seperti menyebarkan kebencian, hoaks, bahkan sikap-sikap intoleran dan radikal cenderung disebarkan oleh masyarakat awam. Penyebab dari penyebaran intoleransi di media sosial karena krisis jati diri setiap individu atau golongan di kehidupan bermasyarakatnya. Merasa kehilangan keadilan atau perhatian di lingkungannya lalu mendapatkan tempat pelarian untuk meluapkan kekesalan, keresahan, dan ketidak puasannya melalui media sosial. Faktor emosi labil dari masyarakat awam yang rentan terprofokasi dan mudah percaya dengan berita palsu atau hoaks yang di buat oleh pihak tertentu menyebabkan kasus sikap intoleran kian meningkat. Sebagai peran masyarakat yang baik tentu akan menelaah dahulu info-info tersebut dan tidak termakan berita palsu atau hoaks, apalagi sampai ikut menyebarkan kebencian dan Intoleran terhadap suatu kelompok.

Di samping itu ada Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU) yang merupakan salah satu pelopor solusi untuk kasus Intoleran di Kota Cilegon. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah dan dipegang oleh Gus Yahya. Setelah terselenggaranya Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke -34, warga NU dan Ansor kota Cilegon berhasil untuk mempertahankan usaha nya dalam menurunkan sikap intoleransi yang berada di kota Cilegon.

Ormas sudah berupaya salah satunya dengan cara menggagalkan aksi demo yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2022. Surat undangan aksi penolakan pembangunan gereja di Cilegon sudah dikeluarkan pada tanggal 22 April 2022 oleh organisasi massa Masyarakat Banten bersatu (ormas MBB). Sebelumnya telah terjadi kericuhan yaitu terjadi pembongkaran pagar seng di lahan tempat akan dibangunnya gereja Jemaat Kristen HKBP. Demo tersebut akhirnya dibatalkan karena adanya mediasi dari beberapa pihak yaitu Walikota Cilegon Helldy Agustian, Ketua DPRD Cilegon, Ormas MBB, dan

perwakilan Kementerian Agama. Setelah melakukan mediasi, akhirnya pihak tersebut memutuskan tiga hal. Pertama, MBB harus membatalkan aksi demo pada 25 April 2022. Kedua, pembangunan gereja dibatalkan karena belum melengkapi surat perizinan yang diminta. Lalu ketiga, Ormas MBB harus mendukung penuh apabila perizinan pembangunan gereja sudah memenuhi persyaratan proses pembangunan.

Pada akhirnya demo penolakan tersebut berhasil digagalkan, tapi pembangunan gereja tetap dibatalkan. Dengan adanya tindakan tersebut membuktikan bahwa Pemkot Kota Cilegon masih memiliki sikap intoleransi yang tinggi. Sudah seharusnya Pemkot Kota Cilegon memberi izin pembangunan gereja untuk memfasilitasi kebebasan beribadah antar umat beragama seperti implementasi dalam Sila ke 1 Pancasila.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal yang kami buat ini, Bahwa kasus Intoleransi masih sering marak terjadi di Indonesia dan di sebabkan berbagai faktor-faktor krusial. Intoleran memiliki dampak negatif pada kelompok minoritas maupun mayoritas, yaitu hak beribadah kelompok minoritas terganggu dan pandangan terhadap kelompok mayoritas menjadi buruk, di tambah lagi berpotensi menimbulkan konflik yang memicu permusuhan sehingga tidak mencerminkan nilai dari Sila ke 1 dalam Pancasila.

Pada kasus konflik penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon ini memang benar adanya, hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sikap tidak suka antara kelompok mayoritas yaitu agama Islam dengan kaum minoritas yaitu agama Kristen, sehingga ketika ingin dibangun tempat ibadah agama Kristen ini kelompok mayoritas menolak keras. Di buktikan juga dengan data yang dilansir dari databoks bahwa tidak ada rumah ibadah lain selain rumah ibadah muslim di Kota Cilegon. Meskipun sudah ada dilakukan beberapa solusi hingga demo digagalkan, tetapi pembangunan gereja tetap dibatalkan. Dengan adanya tindakan ini membuat citra Pemkot Kota Cilegon tidak dapat dipercaya

masyarakat dan hak beribadah kelompok minoritas terhalangi. Peran pemerintah dalam hal ini perlu lebih tegas lagi dan tidak menerima langkah yang salah meskipun itu permintaan dari kelompok mayoritas, Sudah seharusnya tanggung jawab pemerintah berlaku adil dan memfasilitasi semua umat beragama di Indonesia dengan aman dan nyaman. Agama berperan menjadi pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Riansyah, Mia Mulyani, Muhamad Faisal AL-Giffari, Shidqi Fadhilah Akbar, Siti Hulailah 2021. Program studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNTIRTA.

Antin Ekaseptiani Arista, 2023. Akuntansi Unika Widya Mandala Madiun.

Burhan Bungin, 2011. Jakarta: Prenadamedia Group.

Elma Haryani, 2019. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Irvan Nurfauzan Saputra; Azkaa Rahiila Hardi, Revo Rahmat. 2023. Universitas Pembangunan Jaya.

Iis Munawaroh, Wahid Abdul Kudus, 2023. Fakultas Studi Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Shendy Susantika, Ikomatussuniah, 2023, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Zuly Qodir, 2016. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta